

REKOMENDASI BERSAMA

Konsultasi Tripartit Regional Jawa Barat Tentang Perlindungan Pendapatan Hari Tua

Bandung, 12-14 Juni 2023

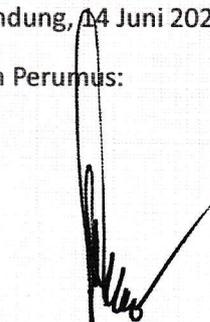
Kami yang bertandatangan peserta konsultasi tripartit regional mewakili pengusaha, serikat pekerja/buruh dan pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat, memberikan rekomendasi bersama terkait perlindungan pendapatan hari tua, sebagai berikut:

1. Bahwa perlunya melakukan perubahan sistem perlindungan pendapatan hari tua yang berlaku saat ini, agar memenuhi prinsip kepastian, kelayakan, keadilan dan keberlanjutan sebagai berikut:
 - 1.1. Melaksanakan program Jaminan Pensiun yang merupakan program:
 - 1.1.1. Wajib bagi seluruh pekerja penerima upah (PPU).
 - 1.1.2. Berbasis iuran sebesar 6% dari upah yang dibayarkan dengan komposisi 2% dari pengusaha, 1% dari upah pekerja dan 3% dari pemerintah selama 15 tahun.
 - 1.1.3. Manfaat pasti dengan nilai manfaat sebesar 75% dari upah terakhir setiap bulannya yang diasuransikan.
 - 1.1.4. Membayarkan manfaat tersebut secara periodik setiap bulan sejak peserta memasuki usia pensiun, atau cacat permanen, atau meninggal dunia.
Catatan: Penerima manfaat pensiun yang mengalami cacat permanen dengan masa iur kurang dari 15 tahun akan diberikan secara proporsional.
 - 1.2. Melaksanakan program Jaminan Hari Tua yang merupakan program:
 - 1.2.1. Wajib bagi seluruh pekerja penerima upah (PPU) dan sukarela bagi pekerja bukan penerima upah.
 - 1.2.2. A. Berbasis iuran sebesar 3.7% dari perusahaan dan 2% dari pekerja penerima upah
B. Untuk pekerja bukan penerima upah iurannya 2% dari minimal pendapatan sebesar Rp 1.000.000
 - 1.2.3. Iuran pasti dengan nilai manfaat sebesar total iuran yang dibayarkan dan nilai pengembangan
 - 1.2.4. Membayarkan manfaat tersebut secara lump sum pada saat peserta memasuki usia pensiun.
 - 1.3. Pemerintah wajib menciptakan skema baru terkait program Jaminan Pensiun Sosial:
 - 1.3.1. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan manfaat Jaminan Pensiun Sosial dengan nilai manfaat sebesar minimal Rp 500.000 setiap bulan.
 - 1.3.2. Membayarkan manfaat tersebut secara periodik setiap bulan sejak peserta memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal Dunia.
2. Pemerintah wajib menyusun regulasi yang mengatur batas usia pensiun dan usia penerima manfaat maksimal 60 tahun.

Demikian rekomendasi bersama ini kami susun sebagai masukan bagi perubahan sistem perlindungan pendapatan hari tua.

Bandung, 14 Juni 2023,

Tim Perumus:



(Nisfu Sabani - Perusahaan)



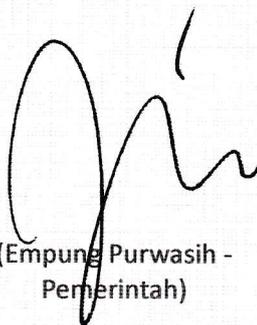
(Andra Gustian Pratama -
Pemerintah)



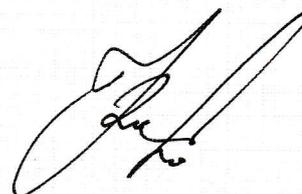
(Hermawan – Serikat pekerja/
Buruh)



(Dwi Susanto - Perusahaan)

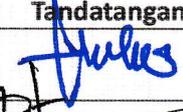
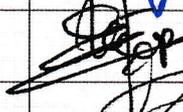
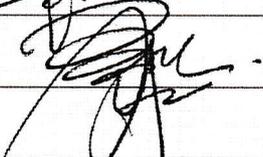
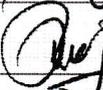
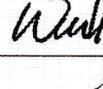
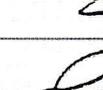
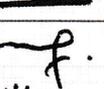
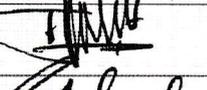
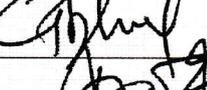
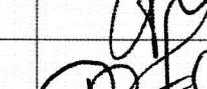
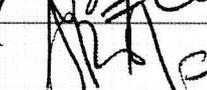
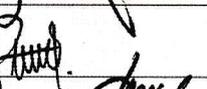
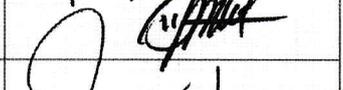
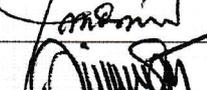
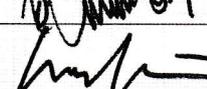
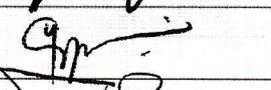
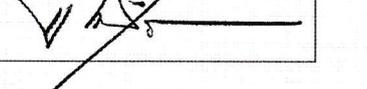


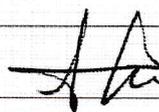
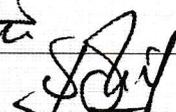
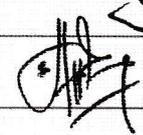
(Empung Purwasih -
Pemerintah)



(Rahmat Saputra – Serikat
pekerja/Buruh)

Peserta Konsultasi Tripartit Regional Jawa Barat Tentang Perlindungan Pendapatan Hari Tua, Bandung, 12-14 Juni 2023

No	Nama	Lembaga / Institusi	Tandatangan
1	Juperianto MB	Disnaker Kota Cimahi	
2	Emat Ruhimat	TSK SPSI Kab. Subang	
3	Riyan Imawansyah	GOBSI Kab. Bandung Barat	
4	Wagiminnudin	SBSI'92 Kab. Bandung Barat	
5	Dewi Handyanie	Disnaker Kab. Bandung Barat	
6	Wika Widyawati	PT TAB Kab. Bandung Barat	
7	Sulistiyanto	FSPMI Kab. Purwakarta	
8	Edi Sartono	Disnaker Kota Bandung	
9	Rizal Rifansyah	PUK SPSI PT Feng Tay Indonesia	
10	Asep Ahmad H	APINDO Kota Cimahi	
11	Tampung Dongoran	Disnakertrans Provinsi Jawa Barat	
12	Dhoni Eko Pribadi	Disnakertrans Provinsi Jawa Barat	
13	Misyadi Khaerun	FSPLEM SPSI Kota Bandung	
14	Arief Rosidi	FSPMI Kab. Purwakarta	
15	Rediana	KASBI Kab. Sumedang	
16	Purwoto	FSPMI Kab. Purwakarta	
17	Andi Handoko	Disnaker Kab. Purwakarta	
18	Gino S	GASPERMINDO Kab. Bandung	
19	Effi Harfiana	APINDO Kab. Sumedang	
20	Dessy Yuliani	PT Feng Tay Indonesia	
21	Restuning Pangestuti	Disnakertrans Kab. Subang	

22	Saehudin	SPN Kota Cimahi	
23	Iman Sukiman	SBSI 92 Kota Cimahi	
24	Jayadi Prasetyo	TSK SPSI Kab. Sumedang	
25	Ester Ningrum Silalahi	Kemnaker RI	